

**LAPORAN PELAKSANAAN
RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TANGGAL 19 NOVEMBER 2019**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pangan, negara berperan mengatur dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha untuk dapat bersama sama mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Presiden Republik Indonesia telah mengingatkan pentingnya sinergitas bersama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat-Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kemandirian Pangan Nasional serta Wlayah. Koordinasi memperkuat sinergitas dan Implementasi kebijakan pembangunan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional. Sebagai lembaga koordinasi fungsional di bawah kepemimpinan Bupati Pesisir Selatan, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) mengemban peran penting dalam meningkatkan sinergitas antar instansi khususnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program pangan, baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Ketahanan Pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah, perhatian terhadap ketahanan pangan (Food Security) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas politik dan keamanan. Ketahanan Pangan diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan aman. Ketahanan pangan selayaknya dibangun atas kemampuan sendiri, yaitu didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Ketahanan pangan selayaknya dibangun atas kemampuan sendiri, yaitu didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Ketahanan pangan diklasifikasikan mulai dari ketahanan pangan tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten serta ketahanan pangan rumah tangga dan perorangan.

Memahami pentingnya Ketahanan Pangan, Pemerintah mengatur hal tersebut didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam dan bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif serta berkelanjutan.

Dewasa ini pembangunan ketahanan pangan dan gizi difokuskan pada penguatan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan diyakini dapat diwujudkan dengan melaksanakan program swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah produk pangan dan ekspor pangan, pengendalian impor, diversifikasi pangan, penguatan kelembagaan petani, pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan lain sebagainya.

Pengembangan Kawasan/Pembinaan Nagari Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan bahwa kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kondisi kerawanan pangan dapat bersifat kronis dan transien. Kerawanan Pangan juga disebabkan oleh kemiskinan berkepanjangan.

Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan kemiskinan dikatakan bahwa (1) penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; dan (2) Program penggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
3. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Pedoman pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan melalui Kemandirian Pangan di Propinsi Sumatera Barat sekaligus untuk pemantapan Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan maka dikeluarkan Program Pengembangan Nagari Pangan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-206-2017 tentang Penetapan Lokasi Nagari/Kelurahan/Desa Mandiri Pangan Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017 bahwa Kabupaten Pesisir Selatan dialokasikan 2 (dua) Nagari yakni di Nagari Taratak Kecamatan Sutera, Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir. Ditahun 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-650-2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi dan Replika Nagari/Kelurahan/Desa serta Kelompok Tani Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 kembali Pesisir Selatan mendapatkan 3 (Tiga) lokasi Nagari untuk Nagari

Mandiri Pangan yaitu Nagari Limau Gadang Lumpo, Nagari Taratak dan Nagari Inderapura Selatan.

Gerakan yang dilakukan di nagari mandiri pangan ini tidak sebatas kegiatan bidang tanaman pangan namun dalam hal perkebunan yang diharapkan nanti bisa menjadi pendapatan tetap bagi petani juga dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah untuk Nagari Taratak Kecamatan Sutera dikembangkan komoditi Durian Montong 213 batang, manggis 419 batang dan Sirsak 600 batang dan Nagari Sungai Tunu Utara Dikembangkan Komoditi Durian montong 212 batang, manggis 418 batang dan sirsak 600 batang batang begitu juga dengan sektor perikanan juga dilakukan dengan menebar benih sebanyak 21000 ekor di dalam embung timbulun dimana saat penebaran dilakukan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan H. Hendra Joni, begitu juga dengan peternakan memberikan bantuan kepada kelompok tani berupa mesin penetas telur dan memberikan pelatihan cara berbudidaya unggas, dan pelatihan pengolahan hasil peternakan berupa pembuatan telur asin.

Dilokasi ini juga diberikan bantuan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Gapoktan Batang Timbulun dan Gapoktan Sungai Tunu Utara melalui Tokoh Tani Indonesia (TTI) untuk menjaga kestabilan harga dan diharapkan masyarakat pada Nagari ini mendapatkan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau, untuk ketersediaan pangan juga dibangun lumbung pangan masyarakat (Kelompok Lumbung Pangan Timbulun) dan bantuan Race milling sekaligus dengan rumah pengeringan (Draiye) sehingga kualitas beras yang dihasilkan sangat baik dan produk berasnya saat ini telah dipasarkan ke Batam bekerjasama dengan Tokoh yang dibangun oleh Perantau Sumatera Barat dan Jakarta Gapoktan bekerjasama dengan pihak pemilik rumah makan Padang se Jabotabek, Dan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari juga masuk pada Nagari Mandiri Pangan ini sehingga ibu-ibu rumah tangga tani ini memiliki aktivitas untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

Dengan segitu banyak program yang masuk ke Nagari mandiri pangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang awalnya berada pada garis nagari rawan pangan menjadi nagari yang sejahtera

dengan tingkat ketahanan pangan yang baik dan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dimasa depan.

Program ini tidak akan berhenti dengan dua nagari ini akan dilanjutkan kenagari-nagari lain yang ada di kabupaten Pesisir Selatan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten Pesisir Selatan menjadi merata. Untuk Tahun 2019 ini telah ditetapkan 3 Nagari Mandiri Pangan yaitu Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai, Kambang Utara Kecamatan Lumpo dan Indrapura selatan Kecamatan Pancung Soal Telah ditetapkan oleh SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 521/128/Kpts/BPT-PS/2019 yang akan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh seluruh OPD baik ditingkat Provinsi Sumatera Barat Maupun tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menuntaskan masalah daerah rawan pangan ini Bupati Pesisir Selatan tidak hanya membangun sektor produksi dan transportasi saja namun juga memperhatikan bagaimana masyarakat dapat hidup dengan layak dengan tempat tinggal dengan rumah layak Huni, sampai dengan tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dibangun adalah nagari Kambang utara sebanyak 76 rumah, Limau gadang Lumpo sebanyak 36 rumah, Nagari Taratak 12 rumah dan nagari Sungai Tunu Utara sebanyak 6 rumah. Kegiatan rehap Rumah Tidak Layak huni ini akan terus dilanjutkan pelaksanaan kegiatan ini tidak saja dilokasi nagari mandiri pangan namun untuk seluruh nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Karena Beliau menyadari tidak akan dapat hidup sehat dan sejahtera bagi masyarakat tanpa di dukung dengan tempat tinggal yang layak. Untuk saat ini telah dibangun lebih dari 4000 rumah tidak layak huni telah diselesaikan.

Dan pemerintah juga memperhatikan akses permodalan bagi Nagari mandiri pangan melalui pinjaman KUR yang ada di Bank Nagari dan Bank BRI, dan saat ini masyarakat nagari mandiri pangan telah memanfaatkan fasilitas ini untuk peningkatan produksi dan perdagangan hasil pertanian.

Dengan berbagai Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk penanggulangan Kemiskinan, maka akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Hal ini dapat dilihat dari data Pesisir Dalam Angka Tahun 2018 bahwa IPM masyarakat Pesisir Selatan

yang terus meningkat yaitu 68,07 tahun 2016, 68,39 tahun 2017 dan 68,74 tahun 2018, dan Pengeluaran Perkapita sebulan Masyarakat yang selalu meningkat yaitu Rp. 841.200 tahun 2016, Rp. 860.500 tahun 2017 dan Rp. 908.446 tahun 2018. Dan Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni tidak akan berhenti pada angka ini dan akan terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan yang Sesuai dengan MISI beliau yaitu "*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera*"

Kegiatan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah/masyarakat nagari untuk menumbuhkan program-program dan kegiatan yang menyangkut kerawanan pangan dan gizi
2. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran keluarga/anggota kelompok sasaran untuk mengembangkan kemandirian pangan masyarakat.
3. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Nagari/Kelurahan. Menumbuhkan kesadaran keluarga agar mau dan mempunyai motivasi dan mampu memanfaatkan lahan diwilayahnya untuk menjadi sumber pangan dan gizi keluarga.
4. Mengelola dan mengembangkan bantuan (bibit, benih) yang diberikan secara baik dan berkesinambungan serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepada masyarakat sekitar sehingga tersedianya bahan pangan untuk konsumsi keluarga dan masyarakat
5. Untuk memotivasi masyarakat di Nagari/Kelurahan untuk memanfaatkan lahan-lahan terlantar, pekarangan atau lahan yang belum diolah sebagai sumber gizi keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat.
6. Melakukan koordinasi dengan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Program dan Kegiatan Nagari Mandiri Pangan di kabupaten Pesisir Selatan.

IV. SASARAN

Sasaran Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah Sinkronisasi Program di Nagari Mandiri Pangan dalam rangka penanggulangan Kerawanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dapat dilihat dari Peta Kerawanan Pangan Tahun 2018-2019 Kabupaten Pesisir Selatan yang tingkat kerawanan pangannya membutuhkan sentuhan dalam hal program dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang terkait dengan kesehatan masyarakat, produksi dibidang pertanian, Akses jalan, sumberdaya air, pendidikan, serta program peternakan dan perikanan.

V. PERMASALAHAN

Pembangunan Nagari Mandiri Pangan saat ini difokuskan pada program penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan dengan jalan peningkatan ketahanan pangan dan pemenuhan pangan di wilayah tersebut serta keamanan pangan di Nagari tersebut yang menjadikan permasalahan yang harus kita benahi secara bersama-sama baik ditingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten.

Pengembangan sistem ketahanan pangan diupayakan secara terpadu dan terintegrasi dengan menjalin koordinasi lintas sub sektor dan sektor pertanian, peternakan, perikanan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di wilayah nagai, yang pada saat ini masih lemah dan belum tersosialisasi dengan baik.

Sinkronisasi Program di Nagari Mandiri Pangan yang belum tercapai dan belum tersosialisasikan oleh pihak-pihak terkait, serta perlunya koordinasi antar stakeholder dalam penanganan Nagari Mandiri Pangan ini diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Pangan

VI. PROSES DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PERTEMUAN EVALUASI

A. Waktu Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 bertempat di Triza Hotel Painan

B. Jumlah Peserta

Jumlah peserta secara keseluruhan adalah 75 orang yang diikuti oleh Kepala OPD se Kabupaten Pesisir Selatan atau yang mewakili, Camat se Kabupaten Pesisir Selatan atau yang mewakili, Kepala UPTD/Koordinator Bala Penyuluhan Kecamatan, Wali Nagari yang menangani Nagari Mandiri Pangan serta Kelompok Binaan yang berada di wilayah Nagari Mandiri Pangan, Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat, Pokja Ahli Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat, Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, staf dilingkungan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Pokok Bahasan

Pokok Bahasan yang dilakukan pada Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tersebut adalah:

- Penanggulangan Kerawanan Pangan dengan Sinkronisasi Program di Nagari Mandiri Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat
- Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan
- Penanggulangan Kerawanan Pangan dengan Sinkronisasi Program di Nagari Mandiri Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

D. Narasumber

Untuk Narasumber pada Pertemuan Evaluasi ini terdiri dari :

- Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat
- Pokja Ahli Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat
- Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
- Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

E. Keluaran (Output)

Hasil dari Rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :

1. Diterbitkannya Rumusan Penanganan Nagari Mandiri Pangan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Tersosialisasikannya Program Nagari Mandiri Pangan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ke Kecamatan dan Nagari
3. Teralokasikannya program dan kegiatan masing-masing OPD selaku Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Pengembangan Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Terpantaunnya dan terevaluasinya penanganan dimasing-masing Nagari yang rawan Pangan
5. Meningkatnya kemampuan Kecamatan dan Nagari secara partisipatif dalam penanganan Nagari Mandiri Pangan
6. Teridentifikasi seluruh permasalahan yang ada di masing-masing Nagari dan kecamatan dalam kerawanan pangan
7. Teratasinya seluruh permasalahan yang ada di Kecamatan dan Nagari terhadap Nagari Mandiri Pangan

VII. MANFAAT PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat diperoleh manfaat diantaranya:

1. Dikelurkannya kebijakan dan program yang tertuang dalam Rumusan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
2. Teralokasikannya program dan kegiatan di Nagari mandiri pangan oleh masing-masing PD selaku Anggota Dewan Ketahanan Pangan di kabupaten Pesisir Selatan

3. Tersosialisasikannya Program Nagari Mandiri Pangan dari Propinsi Sumatera barat sampai ke tingkat Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Terbinnaya Nagari Mandiri Pangan yang telah dikelurkannya Keputusan Gubernur Nomor521-650-2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi dan Replika Nagari/Kelurahan/Desa serta Kelompok Tani Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Demikianlah Laporan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat dengan harapan terjalannya koordinasi antara anggota Dewan Ketahanan Pangan, Camat dan Nagari dengan Dinas Instansi terkait di Propinsi Sumatera Barat dalam rangka pengembangan Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, Terimakasih

RUMUSAN

HASIL RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019

1. Setiap Nagari harus memiliki Lumbung Pangan
2. Ketahanan pangan dimulai dari tingkat rumah tangga dengan melaksanakan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
3. Penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh sektor mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten
4. Perlunya sinergitas seluruh sektor terkait dalam menyelesaikan persoalan kerawanan pangan terutama pada Nagari Mandiri Pangan melalui program dan kegiatan ketahanan pangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten
5. Nagari Mandiri Pangan sudah merupakan prioritas dalam pembangunan daerah dengan mendorong pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana serta peningkatan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan Nagari Mandiri Pangan
6. Adanya gerakan penghijauan disepanjang aliran sungai untuk menjaga cadangan air (Air Bersih) melalui penanaman buah-buahan
7. Untuk memperpendek rantai distribusi pangan sampai ke masyarakat perlu adanya pembangunan pasar nagari terutama di nagari Mandiri Pangan
8. Membangun Irigasi pada lahan pertanian akan menjaga stabilitas kebutuhan air pada lahan pertanian
9. Menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dimana pangan sebagai urusan wajib, maka sudah waktunya pemerintah berpihak kepada ketahanan pangan melalui peningkatan alokasi anggaran ketahanan pangan yang tersebar di OPD
10. Guna meningkatkan kesejahteraan petani sebagai penghasil gabah maka diharapkan petani menjual beras bukan menjual gabah yang selama ini harganya dipermainkan oleh pedagang pengumpul

DOKUMENTASI

RAPAT KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
DI TRIZA HOTEL
TANGGAL 19 NOVEMBER 2019





DOKUMENTASI

PENYERAHAN HADIAH PEMENANG LOMBA ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019









